

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G., & Lestari A. I. 2013. *Perbandingan Kontrak Konstruksi Indonesia dengan Kontrak Kontruksi Internasional*. Jurnal Ganec Swara. Vol. 7 No.2. September 2013. Hal. 64-69.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2008. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Djatnika., S., S. 2018. *Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- Ervianto, W., I. 2017. *Praktek Korupsi Dalam Proyek Konstruksi*. Jakarta: Seminar Nasional UPH.
- Fahmi, Rozy. 2011. *Klaim Sebagai Penyebab Sengketa Konstruksi dan Penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.
- Faiqoh, Zamrotul. 2013. *Analisis Peletakan Genetic Momen Sejarah Matematika dalam Aktifitas Pembelajaran*. Surabaya: UIN Surabaya.
- FIDIC. 2008. *General Conditions of Contract for Construction, Multilateral Development Bank Harmonised Edition 2006*. Terjemahan: Hardjomuljadi, dkk. Jakarta: LPJK, INKINDO, FIDIC.
- Himari, A., R. (2019). *Tinjauan Kinerja Pompa Air tanpa Motor Desa Alale Kabupaten Bone Bolango*. Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi. Vol. 7 No. 2. Hal. 118-128.
- Ibsaini, & Syahbandir, M., 2018. *Pertanggungjawaban Koorporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Aceh: Legitimasi, Vol.7 No. 1, Januari-Juni. Hal. 67-90.
- Indonesia Corruption Watch. 2018. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*. Jakarta: ICW.
- Kaming, P., F., & Panuntun, D., 2012. *Penyimpangan Perilaku Para Pelaku Jasa Konstruksi*. Jakarta: Konferensi Nasional Teknik Sipil Universitas Trisakti.
- Kautsariyah, S., & Hardjomuljadi, S., 2016. *Analisis Penyimpangan Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Secara Elektronik di Pemerintah Daerah*. Jurnal Konstruksia, Vol. 8 No. 1, Desember 2016. Hal. 75-86.
- Kementerian Keuangan. 2019. *Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. *Visi Pembangunan Industri Manufaktur 2045 dalam Visi Indonesia 2045*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Khair, M., N., A., 2014. *Analisis Pola Korupsi di Lembaga Pemerintah Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kissiedu, M., A. 2009. *The Development of Appropriate Strategies for The Prevention of Costruction Disputes in Ghana*. Kumasi: Kwame Nkrumah University.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Kata Kelola Pemerintah yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*. Jakarta: Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. *Modul Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Anti Corruption Learning Center (ACLC) KPK.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. 2019. *Kemajuan Proyek Strategis Nasional*. Jakarta: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
- Kurniawan, F., 2016. *Jenis Sengketa yang Sering Terjadi Pada Proyek Konstruksi di Surabaya*. Surabaya: Jurnal Manajemen Konstruksi Hal. 227-232.
- Kushartomo, W., dan Karla, P. 2017. *Memperkirakan Mutu Beton Menggunakan Concrete Hammer Test, Ultrasonic Pulse Velocity Test dan Core Drill Test*. Konferensi Nasional Teknik Sipil 11. 26-27 Oktober. Universitas Tarumanegara: 1-6.
- Monayo, A., W. (2010). *Perbandingan Biaya Pokok Pengangkatan Air dengan Pompa Air tanpa Mesin dan dengan Pompa Mesin*. Jawa Barat: Institut Pertanian Bogor.
- Paramestri, Ica., dkk. 2013. *Analisis Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi di Kabupaten Tegal*. Semarang: Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro.
- Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*. Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa*. Bogor: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Retnawati, Heri. 2016. *Analisis Kuantitatif Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Simatupang, P., H., & Saragi, Y. 2017. *Petunjuk Penerimaan Beton Berdasarkan Peraturan Indonesia*. Kupang: Research Gate.

- Sohail, M., & Cavill, S. (2008). *Accountability to Prevent Corruption in Construction Projects*. *Journal of Construction Engineering and Management* - ASCE, Vol. 134 (September), pp. 729–738.
- Subdirektorat Statistik Konstruksi. 2018. *Konstruksi dalam Angka*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Yarisetouw, H., T. 2015. *Identifikasi Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dalam Lingkup Proyek Konstruksi Pemerintah Daerah (X). Tinjauan dari Perspektif: Pemerintah dan Kontraktor*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.